



## KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA

### **PENGAWASAN PENDIDIKAN KARAKTER PANCA WALUYA JAWA BARAT ISTIMEWA (PENDIDIKAN BARAK MILITER BAGI ANAK BERPERILAKU KHUSUS) PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT**

Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Pendidikan telah meluncurkan Program Pendidikan Karakter Panca Waluya Jawa Barat Istimewa, yang ramai dikenal publik sebagai “Pendidikan Barak Militer bagi Anak Nakal/Bermasalah”. Program ini merupakan bagian dari implementasi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat, No. 5 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Bagian Ketiga Tentang Fungsi dan Tujuan Penyelenggaraan Pendidikan di Jawa Barat, serta Surat Edaran Gubernur Jawa Barat No. 43/PK.03.04/Kesra, tertanggal 2 Mei 2025, yang memuat “9 Langkah Pembangunan Pendidikan Jawa Barat Menuju Terwujudnya Gapura Panca Waluya”, yakni pembentukan peserta didik yang Cageur, Bageur, Bener, Pinter, tur Singer.

Isi Surat Edaran Gubernur Jawa Barat yang berkaitan langsung dengan program Pendidikan Karakter Panca Waluya Jawa Barat Istimewa, tercantum dalam poin 7 dan 8. Pada poin 7, ditegaskan bahwa untuk meningkatkan disiplin, serta rasa bangga sebagai warga negara yang mencintai NKRI, setiap peserta didik harus memahami wawasan kebangsaan, dengan mengembangkan kegiatan ekstrakurikuler seperti Pramuka, Paskibra, Palang Merah Remaja, dan kegiatan lainnya yang memiliki implikasi positif pada pembentukan karakter kebangsaan peserta didik. Sementara pada poin 8, disebutkan bahwa peserta didik yang memiliki perilaku khusus, yang sering terlibat tawuran, main *game*, merokok, mabuk, balapan motor, menggunakan knalpot brong dan perilaku tidak terpuji lainnya, akan dilakukan pembinaan khusus, setelah mendapatkan persetujuan dari orang tua, melalui pola kerja sama antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan Jajaran TNI dan Polri.

Program Pendidikan Karakter Panca Waluya Jawa Barat Istimewa yang telah berjalan sejak 2 Mei 2025 hingga saat ini, menimbulkan beragam tanggapan, baik dukungan maupun penolakan. Dari perspektif perlindungan anak, program ini harus dijalankan dengan menghormati, melindungi dan memenuhi (*to respect, to protect dan to fulfill*) prinsip-prinsip dasar pemenuhan hak anak; non-diskriminasi, kepentingan terbaik anak, hak hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, serta penghargaan terhadap pendapat anak. Prinsip-prinsip tersebut menjadi landasan utama dalam setiap kebijakan yang menyangkut anak, agar mereka mendapat perlakuan sama, kebutuhan mereka menjadi prioritas, dan pendapat mereka didengar. Salah satu bentuk pelanggaran terhadap prinsip ini tercermin dari adanya praktik diskriminatif dan tidak dilibatkannya anak dalam proses, yang kemudian menimbulkan stigma negatif seperti label “anak nakal” atau “anak bermasalah” terhadap peserta program. Hal ini akan berdampak pada tumbuh kembang anak di kemudian hari, sekaligus berpotensi mengabaikan pemenuhan hak-hak anak lainnya. Sejumlah kajian akademik dan riset juga menunjukkan bahwa penanaman karakter dengan pendekatan pendidikan militer hanya memberikan dampak sementara, terlebih jika tidak didukung oleh ekosistem pemenuhan hak yang optimal, seperti peran pengasuhan keluarga, dukungan satuan pendidikan, serta lingkungan sosial dan budaya yang kondusif.

KPAI yang memiliki tugas melakukan pengawasan atas penyelenggaraan Perlindungan Anak dengan tujuan memastikan tidak terjadi pelanggaran terhadap pemenuhan hak dan perlindungan anak, membaca indikasi adanya dugaan pelanggaran prinsip dasar perlindungan anak, serta

amanah Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Sehingga berdasarkan hal tersebut KPAI berkunjung ke lokasi penyelenggaraan Program Pendidikan Karakter Panca Waluya Jawa Barat Istimewa, yakni di Barak Militer Resimen 1 Sthira Yudha Purwakarta dan Depo Pendidikan Bela Negara Rindam III Siliwangi, Cikole Kabupaten Bandung Barat. Tujuan kunjungan ini untuk mendapatkan informasi yang akurat tentang bagaimana realisasi pelaksanaan program di lapangan, serta memastikan adanya tindakan mitigasi terhadap risiko pelanggaran prinsip dasar perlindungan anak. Selain itu, KPAI juga menilai pentingnya adanya regulasi yang tepat dan memadai, ketersediaan sumber daya manusia dan anggaran yang cukup juga berkelanjutan, layanan komprehensif dan sesuai prinsip dasar perlindungan anak, serta memastikan ekosistem perlindungan anak bekerja secara optimal.

Pengawasan terhadap program ini dilakukan dengan pendekatan yang beragam, mencakup metode dan teknik pengumpulan data dan informasi yang mengedepankan partisipasi langsung anak. Selama pelaksanaan kunjungan lapangan, KPAI berdialog dengan berbagai pihak, termasuk penyelenggara program di barak militer, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB), UPTD PPA, Musyawarah Guru Bimbingan Konseling (MGBK), Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS), serta para peserta didik program pendidikan khusus. Dalam proses pengumpulan data, KPAI melakukan diskusi dengan pelaksana program, menyebarkan instrumen pengawasan kepada 90 peserta program, melaksanakan wawancara tertutup dengan anak-anak, meninjau langsung kondisi sarana dan prasarana, serta mengamati proses pembelajaran, kegiatan makan, dan latihan yang dijalani anak selama program berlangsung..

### **Hasil Pengawasan**

Pelaksanaan Program Pendidikan Karakter Panca Waluya Jawa Barat Istimewa menghasilkan sejumlah temuan penting, sebagai berikut:

1. Belum optimalnya perhatian terhadap regulasi yang mengatur perlindungan anak, seperti Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak. Ketidaksihesuaian ini berdampak pada munculnya stigma serta pelabelan yang bersifat diskriminatif terhadap anak dan minimnya ruang partisipasi anak dalam program tersebut.
2. Belum terdapat standar baku yang menjadi acuan dalam penyelenggaraan program, seperti belum ada panduan, petunjuk teknis (juknis) dan Standar Operasional Prosedur (SOP). Hal ini mengakibatkan adanya perbedaan pola pelaksanaan di 2 (dua) program yang dikunjungi. Perbedaan tersebut mencakup struktur program, ketersediaan sarana prasarana, rasio antara peserta dan pembina, serta metode pengajaran mata pelajaran sekolah yang tidak seragam meskipun berasal dari jenjang kelas dan jurusan yang berbeda. Kondisi ini dikhawatirkan dapat memengaruhi mutu hasil dari program secara keseluruhan.
3. Struktur program pendidikan karakter yang diterapkan di 2 lokasi yaitu Barak Militer Resimen 1 Sthira Yudha Purwakarta dan Depo Pendidikan Bela negara Rindam III Siliwangi, Cikole Kabupaten Bandung Barat, dinilai cukup baik. Program ini memuat unsur-unsur penting seperti pendidikan bela negara, penguatan mental, spiritual dan sosial, pembentukan kedisiplinan, peningkatan kemandirian, serta penguatan nilai-nilai kebangsaan.

4. Seluruh peserta program Pendidikan Karakter Panca Waluya Jawa Barat Istimewa berasal dari kalangan siswa usia SMP/MTs dan SMA/MA/SMK yang tercatat aktif dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Padahal, masih terdapat banyak anak dengan kondisi rentan berlapis lainnya yang juga membutuhkan perlindungan khusus, namun belum terjangkau oleh program ini.
5. Berdasarkan latar belakang para siswa yang mengikuti program di dua lokasi barak militer, yakni di Lembang dan Purwakarta, faktor penyebab utama mereka masuk ke dalam program ini adalah karena kebiasaan merokok, disusul oleh perilaku sering membolos sekolah, dan di urutan ketiga adalah keterlibatan dalam tawuran. Selain itu, sebanyak 6,7% siswa menyatakan tidak mengetahui alasan mereka mengikuti program. Temuan ini menunjukkan perlunya peninjauan kembali terhadap ketepatan sasaran peserta dalam pelaksanaan program.
6. Peserta program tidak ditentukan berdasarkan asesmen psikolog profesional, melainkan hanya rekomendasi guru BK. Bahkan ada ancaman bahwa siswa yang menolak mengikuti program bisa tidak naik kelas.
7. Hasil wawancara sampel anak di dua lokasi pengawasan mengungkapkan bahwa perilaku menyimpang anak banyak dipengaruhi oleh kurang optimalnya pengasuhan di lingkungan keluarga. Hal ini disebabkan oleh kesibukan orang tua, perceraian, tidak tinggal bersama orang tua, serta harapan anak untuk mendapatkan bimbingan dari figur ayah. Selain itu, pengaruh teman sebaya dan lingkungan sekitar juga turut berperan.
8. Hasil diskusi dengan Dinas terkait mengungkapkan bahwa kekurangan Psikolog Profesional, Pekerja Sosial, dan Guru BK menyebabkan layanan konseling bagi anak dan siswa tidak berjalan secara maksimal.
9. Perangkat UPTD PPA, Puspaga, dan PATBM, Tim PPKSP belum berfungsi optimal karena keterbatasan sumber daya manusia dan dukungan anggaran.
10. Tidak semua Pembina memahami protokol *Child Safeguarding*.
11. Tidak ada kehadiran tenaga medis dan ahli gizi secara tetap di Dodik Bela Negara di Bandung
12. Keterlibatan OPD tingkat provinsi dalam program yang dilaksanakan di Dodik Bela Negara di Bandung, belum optimal.

## **Rekomendasi**

Berdasarkan temuan hasil pengawasan, KPAI merekomendasikan sebagai berikut:

1. Penguatan Pendidikan Karakter merupakan kebutuhan sekaligus hak seluruh anak di Indonesia guna tercapainya tujuan pendidikan nasional. Pemerintah Jawa Barat telah melaksanakan Penguatan ini melalui Program Pendidikan Karakter Pancawaluya Jawa Barat Istimewa. Namun, program tersebut harus didasarkan pada prinsip-prinsip dasar pemenuhan hak dan perlindungan anak, serta regulasi terkait anak lainnya;
2. Program Pendidikan Karakter Pancawaluya Jawa Barat Istimewa yang telah berjalan saat ini cukup dilakukan untuk satu tahap saat ini, dan tahap selanjutnya perlu dilakukan evaluasi menyeluruh untuk merumuskan model program serta standar yang sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan anak. Fokus evaluasi meliputi:
  - a. Harmonisasi regulasi
  - b. Definisi, kriteria, indikator, anak yang membutuhkan perlindungan khusus
  - c. Partisipasi Anak
  - d. Asesmen psikologi
  - e. Struktur program

- f. Mekanisme Pembelajaran mata pelajaran sekolah
  - g. Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung
  - h. SDM yang memiliki kompetensi dalam perlindungan anak
3. Program Pendidikan Karakter Pancawaluya Jawa Barat Istimewa sebagai *Co-Curricular* atau lainnya
  4. Pemerintah Daerah perlu memastikan adanya komitmen tertulis dari pelatih dan pembina Program Pendidikan Karakter Pancawaluya untuk tidak melakukan kekerasan terhadap anak;
  5. Pemerintah Daerah perlu melakukan pemantauan dan evaluasi terkait perubahan perilaku peserta program selama proses pendidikan dan setelah mengikuti program secara berkala;
  6. Pemerintah Daerah perlu mempersiapkan peran orang tua, sekolah, dan lingkungan, untuk mendukung berkelanjutan perubahan perilaku anak pada fase reintegrasi sosial;
  7. Pemerintah Pusat dan Daerah perlu melakukan evaluasi kinerja lembaga layanan perlindungan anak di wilayah masing-masing;
  8. Pemerintah Pusat dan Daerah perlu mengoptimalkan ekosistem perlindungan anak di daerah, khususnya bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus, dengan pendekatan sebagai berikut:
    - a. Dalam lingkungan keluarga, bagi keluarga miskin maka sebaiknya diberikan bantuan sosial/perlindungan sosial, seperti Program Keluarga Harapan (PKH). Apabila orang tua melakukan kekerasan terhadap anak di rumah, maka orang tua tersebut perlu mendapatkan konseling dan perubahan perilaku. Asesmen dari pekerja sosial diperlukan untuk mengidentifikasi dan memahami permasalahan di keluarga. Pendidikan *parenting* juga penting untuk digalakkan agar orang tua mampu menjalankan peran pengasuhan dengan baik;
    - b. Di lingkungan sekolah, kepala sekolah dan guru harus aktif memantau dan mengawasi anak, termasuk saat mereka berada di luar sekolah atau saat pulang pergi. Walaupun seringkali pihak sekolah merasa hal tersebut bukan tanggung jawabnya, mereka bisa berkolaborasi dengan pihak terkait yang memiliki otoritas di jalur tersebut untuk memastikan keselamatan anak. Pendidikan karakter juga harus menjadi bagian integral dalam kurikulum di sekolah;
    - c. Lingkungan pertemanan yang negatif, seperti tawuran dan geng motor, merupakan kelompok yang terorganisir dan berpotensi menjerumuskan anak kembali ke perilaku bermasalah. Intervensi hukum dan sosial harus dilakukan, terutama terhadap provokator utama dalam kelompok tersebut. Program lanjutan setelah pendidikan karakter penting untuk menjaga dan mempertahankan perubahan positif yang sudah dicapai;
    - d. Masyarakat perlu mengubah pandangan negatif menjadi dukungan positif terhadap anak dan remaja yang sudah menyelesaikan pendidikan karakter. Walaupun mereka pernah melakukan kenakalan atau tindakan kriminal, mereka kini telah mengikuti proses pembinaan. Dukung perubahan positif ini dengan menghilangkan stigma, menyediakan ruang kreativitas, memberikan pengasuhan yang baik, serta membantu mereka mempertahankan dan mengembangkan kebiasaan baik. Berbagai organisasi budaya, seni, olahraga, ilmu pengetahuan, agama, dan lingkungan diharapkan dapat merangkul mereka.

Inti dari pendidikan adalah pengembangan kepribadian, bakat, dan kemampuan setiap anak, dengan pengakuan bahwa setiap individu memiliki karakteristik, minat, dan kebutuhan belajar yang unik.

Keterampilan dasar tidak hanya meliputi membaca dan berhitung, tetapi juga kemampuan mengambil keputusan seimbang, mengatasi konflik, menjalani gaya hidup sehat, menjalin hubungan baik, bertanggung jawab sosial, mengembangkan bakat kreatif, berpikir kritis, dan keterampilan hidup lainnya.

Demikian beberapa rekomendasi awal dari KPAI yang disusun berdasarkan hasil analisis dan telaah setelah pelaksanaan kunjungan lapangan. Selanjutnya, rekomendasi ini akan dibahas lebih lanjut melalui forum diskusi kelompok terfokus dan koordinasi bersama kementerian/lembaga serta Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat. Setelah proses tersebut, KPAI akan menyampaikan rekomendasi final kepada pihak-pihak terkait, sekaligus memastikan tindak lanjutnya sebagai bagian dari pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan KPAI dalam memastikan perlindungan hak-hak anak.

KPAI akan terus mendorong penyempurnaan Program Pendidikan Karakter Pancawaluya Jawa Barat Istimewa melalui evaluasi menyeluruh dan kolaborasi antarpemangku kepentingan. Dengan pendekatan yang tepat dan lingkungan yang mendukung, program ini berpotensi menjadi bagian penting dalam membentuk karakter anak yang tangguh, cerdas, dan berintegritas.

Jakarta, 16 Mei 2025

Ketua KPAI

TTD

Ai Maryati Solihah